

MERENCANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI

Rahmat Wardoyo

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Jl, Kapten Suparman 39
Potrobangsang Magelang

Email : Rahmatvikra@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi aksi dalam rangka pemanfaatan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia. Terdapat tujuh rekomendasi yang diberikan, diantaranya perbaikan akses layanan pendidikan, revolusi kurikulum pendidikan, menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, perbaikan akses pelayanan kesehatan, menempatkan penduduk usia lanjut sebagai potensi, bukan beban, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penguatan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani lokal.

Kata Kunci : Bonus Demografi, Perencanaan Pembangunan.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya jumlah penduduk di akibatkan karena jumlah kelahiran yang ternyata jauh melebihi jumlah kematian. Selain itu juga di sebabkan karena sarana pengendalian risiko kematian kian lama kian berhasil di tingkatkan sedangkan penurunan angka kelahiran yang sangat lambat (Nilatus, 2014). Sedangkan seperti yang diketahui pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini sangat tinggi. Hal inipun harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang bagus.

Menurut Candra, 2011 Pertumbuhan penduduk di Indonesia selama periode 1990 sampai 2008 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1995 dengan persentase 8,57% sedangkan laju pertumbuhan penduduk

terkecil terjadi pada tahun 2005 dengan persentase 0,47%.

Pembangunan ekonomi sendiri menurut Todaro, 2000 (dalam jurnal Eny, 2016) berarti suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan kemiskinan absolut.

Hal inipun dilengkapi oleh Subri 2003, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan negara

tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut.

Oleh karena itu dalam konteks administrasi pembangunan maka harus dilihat dari banyak aspek guna mencapai pembangunan yang diharapkan, hal itu sesuai dengan definisi administrasi pembangunan menurut Siagian dalam Ngusmanto, 2015 yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

- **Bonus Demografi Indonesia**

Kependudukan merupakan masalah nasional yang berdampak kepada masyarakat luas, di satu sisi bahwa penduduk yang besar merupakan modal dalam pembangunan, karena disitu terdapat jumlah angkatan kerja yang cukup besar pula. Di lain pihak bahwa penduduk yang besar merupakan beban pemerintah dalam kaitannya kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Oleh karena itu sejak anak-anak usia sekolah telah di pelajari masalah kependudukan, yang termasuk kedalam kelompok bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial atau biasa disebut IPS. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang di dasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sejarah (Depdikbud, 1994 dalam Rosyetti, 2009).

Terlepas dari semua itu nyatanya akan ada kabar baik, tapi sekaligus bisa menjadi kabar buruk. Indonesia akan mendapat Bonus Demografi, yaitu jumlah penduduk berusia produktif mencapai 70% dan tak produktif hanya mencapai 30%. Melimpahnya usia produktif ini bisa menjadi kabar baik karena akan membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam usaha administrasi pembangunan. Sedangkan kabar buruknya adalah, jumlah usia produktif ini juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan setumpuk permasalahan lain jika pemerintah tidak bisa mempersiapkannya dengan baik. Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pernah mengatakan bahwa bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah jika kita berhasil mengambil manfaatnya. Satu sisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik.

Berdasarkan kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi akan terjadi antara tahun 2020 hingga 2030, dengan puncaknya berada pada tahun 2028 hingga 2030, dimana 100 orang produktif akan menanggung 44 orang non produktif, seperti yang diungkapkan Kepala BPS Suryamin 2016, maksudnya pada masa puncak bonus demografi, rasio ketergantungan diprediksi mencapai titik terendah yakni 44 orang tak produktif ditanggung oleh 100 orang usia produktif atau 44%. Sebenarnya, angka rasio

ketergantungan nasional terus menurun dan telah melewati ambang 50% pada tahun 2012. Persentase terbaik rasio ketergantungan di saat puncak bonus demografi memunculkan sebagai *windows of opportunity*.

Sedangkan menurut data yang disusun Bappenas dan BPS Peta penduduk Indonesia saat ini, jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat 255,5 juta jiwa. Jumlah itu terdiri dari penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 69,9 juta jiwa (27,4%) dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas sekitar 13,7 juta jiwa (5,4%). Total usia tak produktif ini sebanyak 32,8%. Sedangkan penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun sekitar 171,9 juta jiwa (67,3%). Begitu memasuki tahun 2020, persentasenya akan berubah dengan jumlah penduduk produktif 70% dan tak produktif 30%. Persentase akan semakin ideal begitu memasuki masa puncak antara tahun 2028-2030. Setelah itu, komposisi bakal mulai kembali menjauh dari persentase ideal. Oleh sebab itulah, bonus demografi hanya akan terjadi sekali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa (Pratama, 2018).

2. DISKUSI

2.1. Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Perencanaan Pembangunan

Dalam artikel ini, penulis memberikan beberapa poin rekomendasi dalam memanfaatkan bonus demografi yang dialami oleh Indonesia. Antara lain :

- **Perbaikan akses pelayanan pendidikan**

Perencanaan kebijakan yang saat ini mendesak adalah bagaimana menyediakan tenaga kerja terdidik penduduk masyarakat Indonesia. karena orangtua yang miskin biasanya akan membelanjakan sumberdayanya yang terbatas untuk investasi dan konsumsi selain untuk pendidikan anaknya (Solon, 2004). Tidak meratanya distribusi sekolah dapat disebabkan karena kondisi geografis dan terbatasnya anggaran pemerintah. Oleh karena itu pemerintah bisa mengadopsi sistem manajemen pemerintahan baru dimana kerjasama dengan pihak ketiga seperti LSM, kelompok masyarakat, dan sektor swasta memungkinkan pemerintah menyediakan pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara merata bahkan di daerah terpencil. Ada juga program sukarela seperti ‘Indonesia Mengajar’ atau program sejenis yang memobilisasi orang-orang untuk mengisi celah kekosongan pendidik di daerah terpencil Indonesia.

- **Revolusi kurikulum pendidikan**

Pada sisi selanjutnya, penduduk juga diharapkan aktif untuk terus berinovasi sehingga tidak selalu bergantung pada upaya pemerintah. Mindset penduduk perlu dirubah, dari pola lama: “melamar pekerjaan”, menjadi “menciptakan lapangan pekerjaan”. Untuk itu, modal dasar yang diperlukan menuju kearah tersebut adalah perlunya revolusi dalam kurikulum pendidikan yang mana dalam setiap mata

pelajaran atau perkuliahan menyelimkan unsur-unsur kewirausahaan dalam diri peserta didik. Hal ini perlu dilakukan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi tanpa mengenyampingkan pendidikan karakter yang sudah berjalan. Saat ini hal demikian belum maksimal dilakukan terutama di tingkat perguruan tinggi. Akibatnya, jumlah pengangguran terdidik terus bertambah karena tidak semua lulusannya dapat tertampung di dunia kerja akibat minimnya keterampilan dan jiwa wirausaha yang dimiliki (Maryati, 2015).

Untuk mencapai pembangunan dalam bidang pendidikan pemerintah juga bisa mengarahkannya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD diyakini menjadi investasi terbaik karena memberi timbal balik terbesar sebagaimana diketahui bahwa keterampilan kognitif kompleks di usia dewasa tergantung konstruksi pendidikan di saat mereka masih usia dini (Heckman, 2008). Pendidikan sosial emosional dan non-kognitif pada usia dini akan menentukan perkembangan keterampilan individual yang dibutuhkan bursa tenaga kerja (Athreya & Romero, 2013).

- **Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas**

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam

proses pembangunan. Kapasitas dasar yang dimaksud menurut Todaro, 2003 (dalam jurnal Sugiharto, 2015), yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Bonus demografi hanya akan terjadi ketika ada upaya rekayasa demografi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **Perbaikan akses pelayanan kesehatan**

Sementara itu, ketimpangan akses ke pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting model keseimbangan yang dibangun Mejia dan Pierre, 2005 (dalam jurnal Kristian Hariyono, 2016). Model ini menyimpulkan bahwa ketimpangan akses ke pelayanan dasar memicu rendahnya modal rata-rata sumber daya manusia. Tingginya ketimpangan distribusi sumber daya manusia dan tingginya ketimpangan pendapatan, tentu mempengaruhi jumlah sumber daya manusia yang berkualitas.

Penelitian lain menggunakan angka harapan hidup, kematian bayi dan mobilitas sebagai indikator ketimpangan kesehatan. Hal ini telah menunjukkan bahwa kesenjangan kesehatan memang terjadi. Untuk mengurangi ketimpangan kesehatan tersebut, penting bagi pemerintah untuk fokus dalam penyediaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah. Agar nantinya dapat

meningkatkan angka harapan hidup di Indonesia.

- **Menempatkan penduduk usia lanjut sebagai potensi, bukan beban**

Banyak penelitian menyebutkan bahwa penduduk usia lanjut di Indonesia masih terus dan tetap memproduksi. Pada usia 65 tahun ke atas, mereka masih menggunakan kemampuannya untuk memenuhi sekitar 40% kebutuhan konsumsinya, dimana penduduk usia lanjut miskin dan tidak miskin tidak banyak memiliki perbedaan. Penelitian serupa dilakukan Cameron (2000) dan McKee (2005) (dalam Sarmita, 2017) yaitu bahwa kelompok usia tua Indonesia terus bekerja terutama di sektor pertanian. Meskipun alasan utama untuk terus bekerja adalah kurang siapnya perbekalan masa tua serta masih adanya anak atau cucu yang harus dibantu. Tingginya partisipasi kerja penduduk usia lanjut merupakan hal positif yang bisa terus dioptimalkan. Apalagi menurut data BPS jumlah penduduk berusia lanjut akan bertambah 19% hingga tahun 2045, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi agar tepat di 100 tahun bangsa Indonesia pada 2045 penduduk berusia lanjut bisa terurus.

Berada di era bonus demografi dan kelanjutannya di masa mendatang, peningkatan penduduk usia lanjut di masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai potensi dibandingkan beban. Penduduk usia lanjut dengan permasalahan kesehatan dan

produktivitasnya yang terus menurun dapat menjadi beban. Namun dengan peningkatan kualitas kesehatan yang memberikan angka harapan hidup lebih tinggi maka, penduduk usia lanjut diharapkan untuk terus bisa memproduksi sesuai kemampuannya dan meningkatkan pembangunan khususnya disektor pertanian dimana banyak anak usia muda yang kurang paham dengan pekerjaan sebagai petani.

- **Menciptakan lapangan pekerjaan**

Bonus demografi mempersyaratkan penduduk usia produktif untuk benar-benar produktif (dalam artian ekonomi). Agar penduduk menjadi produktif, maka hal utama yang harus ada adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Di satu sisi, pemerintah dituntut terus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mempermudah investasi yang ramah terhadap lingkungan kerja Indonesia. Apabila dimungkinkan, investasi lebih ditekankan pada sistem padat karya atau setengah padat karya utamanya di daerah pedesaan (Sarmita, 2017). Sehingga nantinya tenaga produktif yang ada di desa tidak lari ke kota melainkan bisa fokus mengembangkan desanya.

- **Pemanfaatan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani lokal**

Pemantapan sektor pertanian sebagai basis untuk memberdayakan petani lokal agar lebih produktif dengan sistem padat karya. Agar mereka lebih produktif, perlu dari pihak pemerintah untuk terus memberikan semacam penyuluhan, inovasi, bantuan, dan

jaminan kerja kepada para petani dengan mengadopsi keberhasilan sistem pertanian di negara-negara lainnya. Pemerintah juga harus berupaya dalam mempersempit kesenjangan upah antara pekerja di sektor pertanian dengan non-pertanian (Sarmita, 2017). Hal ini tentu akan menguatkan kinerja para petani yang memiliki basis terbesar di Indonesia dan akan sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dibidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyono, Kristian. 2016. Perencanaan Pembangunan Di Papua Dan Bonus Demografi 2020. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 2, Nomor 1. file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/37-127-1PB.pdf. Diakses pada 6 Januari 2019
- Hidayat, Reja. (2016, Juli, 20). Pedang Bermata Dua Bernama Bonus Demografi. Tirto.Id. <https://tirto.id/pedang-bermata-dua-bernama-bonus-demografi-btVG>. Diakses 6 Januari 2019
- Maryati, Sri. 2015. Dinamika Pengangguran Terdidik; Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. Journal of Economic and Economic Education, Vol.3 No.2. file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/249-3790-1PB. pdf. Diakses pada 6 Januari 2019
- Maulana, Ari. (2018, Oktober, 10). Bonus Demografi Indonesia Berakhir di 2036, Jumlah Lansia Bakal Naik. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik>. Diakses pada 6 Januari 2019.
- Mustika, Candra. 2011. Pengaruh Pdb Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.1. No.4. file:///C:/Users/HP/Downloads/57-1-104-1-10-20120511.pdf. Diakses 7 Januari 2019
- Ngusmanto. (2015). Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Pratama, Bayu (2018). Memaknai Arti Bonus Demografi. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/bayupratama7086/5c1363ba43322f4f30761ba2/memaknai-arti-bonus-demografi?page=all>. Tanggal 1 januari 2019.
- Rochaida, Eny. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. Forum Ekonomi. Volume. 18 .No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/55282-ID-dampak-pertumbuhan-penduduk-terhadap-per.pdf>. Diakses pada 7 Januari 2019
- Rosyetti. 2009. Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk Dengan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ekonomi. Vol. 17. No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/8761-ID-studi-keterkaitan-pertumbuhan-penduduk-dengan-pembangunan-ekonomi-di-kabupaten-k.pdf>. Diakses pada 7 Januari 2019
- Sarmita, Made. 2017. Refleksi Kritis Kondisi Demografi Indonesia: Antara Bonus Dan Bencana Demografi. Vol. 18, No.1. file:///C:/Users/HP/Downloads/10558-13129-1-PB.pdf. Diakses pada 6 Januari 2019
- Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto. 2015. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/2268-10059-1-PB.pdf. Diakses pada 6 Januari 2019
- Syaadah, Nilatus. 2014. Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja. Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi. Vol. 2 No. 1. file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/ipi267428.pdf. Diakses 7 Januari 2019